

Iklan - Gulir ke Bawah untuk melaju

Iklan

DEMOKRASI

Ketika Negara Kembali Takut pada Film

Pembubaran nonton bersama, represi terhadap media arus utama, hingga menjinakkan media tunawisma merupakan alarm menyempitnya ruang sipil di Indonesia.

KOMPAS/FAKHRI
FADLURROHMAN

Temukan Kami di Google

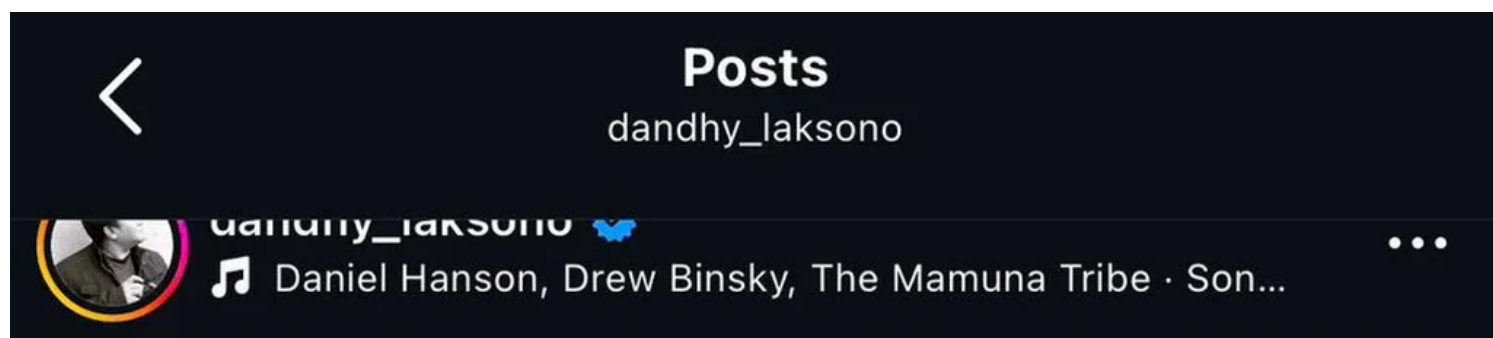
Oleh Ahmad Arif

12 Mei 2026 08:00 WIB · Pendidikan & Kebudayaan

”**K**ami melihat di media sosial, banyaknya penolakan pemutaran film ini karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif, dari judulnya.” Kalimat itu disampaikan Dandim 1501 Ternate Jani Setiadi, seperti terlihat dalam video saat membubarkan pemutaran film dokumenter *Pesta Babi* di Benteng Oranje, Ternate, pada 8 Mei 2026.

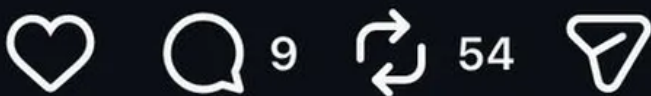
Malam itu, film belum selesai diputar. Diskusi bahkan baru dimulai. Namun, aparat sudah hadir di lokasi. Penyelenggara diminta menghentikan pemutaran. Yang tersisa setelah itu bukan sekadar acara yang batal, melainkan rasa takut yang perlahan menyebar ke ruang-ruang budaya, kampus, dan komunitas.

”Kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate Yunita Kaunar, salah satu penyelenggara pemutaran film. Pembubaran itu dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap ruang demokrasi dan mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu.





Dandhy Laksono @Dandhy_La... · 1m
Coming Soon



Liked by leebakersianturi and others
dandhy_laksono #ResetIndonesia #IndonesiaBaru

March 2

TANGKAPAN LAYAR

Film "Pesta Babi" merupakan film garapan sutradara Dhandy Dwi Laksono. Bersama Cypri Dale, film ini diproduksi melalui kolaborasi sejumlah organisasi advokasi lingkungan dan HAM, seperti Greenpeace Indonesia, Watchdoc, Yayasan Bentala Pusaka, dan Media Jubi.

Peristiwa di Ternate hanyalah satu dari rangkaian panjang intimidasi terhadap pemutaran film dokumenter *Pesta Babi* di berbagai daerah. Sehari sebelumnya, nonton bareng dan diskusi film *Pesta Babi* di depan gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Mataram (Unram) pada Kamis (7/5/2026) juga dibubarkan oleh otoritas kampus. Wakil Rektor Bidang Kemanusiaan dan Alumni Unram Sujita datang langsung memimpin pembubaran.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari AJI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan sejumlah lembaga lain, intimidasi juga dialami oleh siswa-siswa kelas XI F1 SMAN 1 Sungayan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, saat memutar film ini. Pada Mei 2026, pihak Badan Intelijen Negara (BIN) menghubungi kepala sekolah berkenaan dengan pemutaran film tersebut.

Baca Juga

Sikap Represif Musuh Demokrasi

Menurut data WatchDoc, sedikitnya terjadi 21 intimidasi serius: mulai dari telepon aparat keamanan, pengawasan intelijen, tekanan pembatalan acara, permintaan identitas peserta, hingga pembubaran paksa di kampus dan ruang diskusi.

Film karya bersama Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, [Jubi.id](https://www.jubi.id), Greenpeace, dan LBH Papua Merauke itu sebenarnya

berbicara tentang konflik agraria dan perjuangan masyarakat adat Papua Selatan mempertahankan tanah leluhur mereka dari ekspansi industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar.

Namun, justru reaksi terhadap film ini memperlihatkan...
besar, yaitu negara kembali menunjukkan kecemasan...
tidak bisa dikendalikannya.

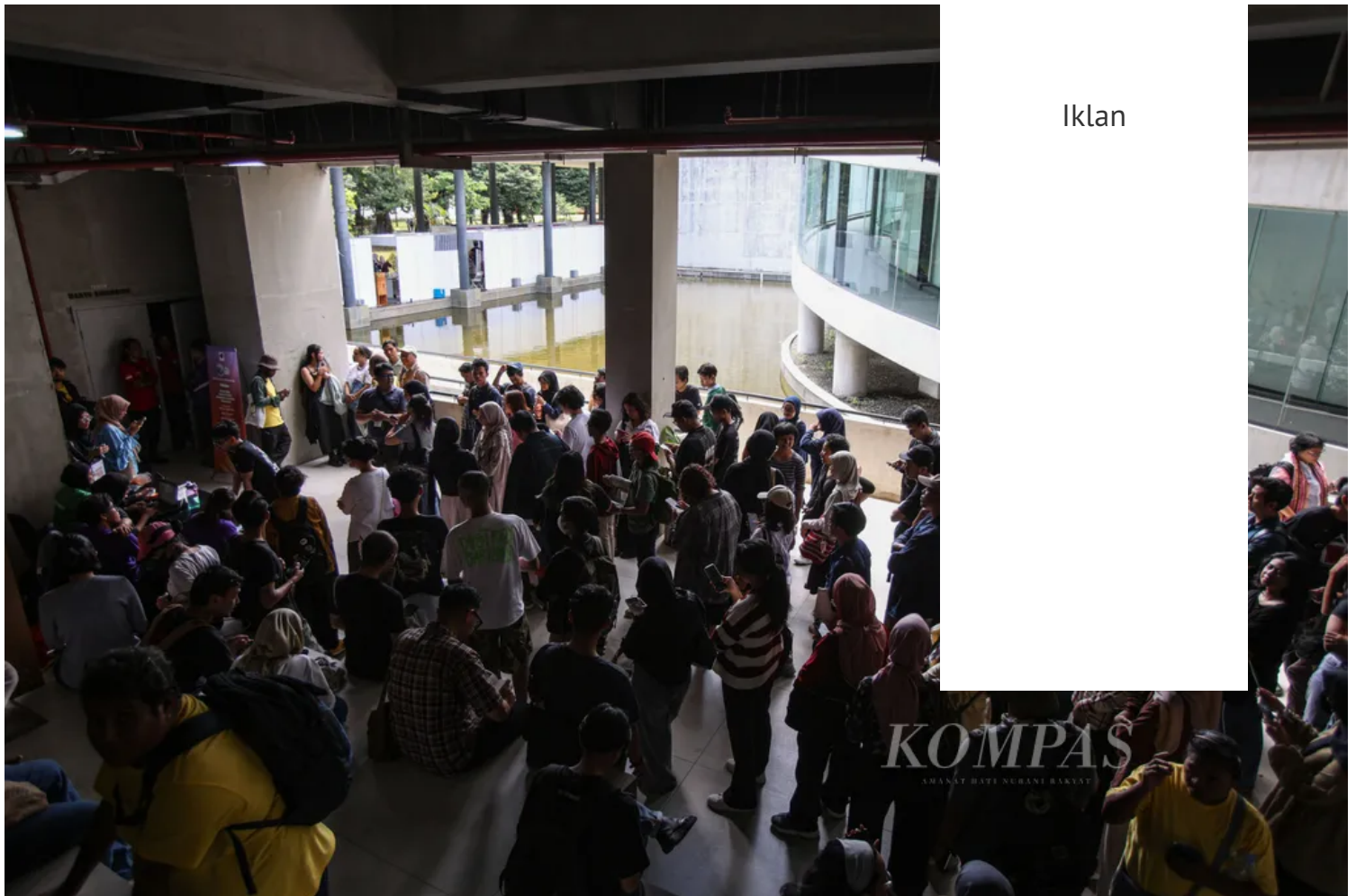
Iklan

1

ig

Baca Juga

**Pembubaran Menonton Bareng Film "Pesta Babi"
Dinilai Berlebihan**



Iklan

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Antrean pengunjung saat akan menyaksikan pemutaran film "Pesta Babi" yang diproduksi Watchdoc pada acara Pesta Media Aji Jakarta 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu (12/4/2026). Pesta Media Aji Jakarta 2026 mengangkat krisis lingkungan hidup dan perkembangan teknologi akal imitasi (AI) sebagai

dua isu yang saling berkelindan dan kian menentukan masa depan jurnalisme di Indonesia.

Penciptaan rasa takut

Fenomena ini mengingatkan pada watak Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, negara membangun sistem kontrol informasi yang ketat. Film, buku, musik, teater, dan media massa diawasi demi menjaga "stabilitas nasional". Kritik dianggap ancaman keamanan. Sensor menjadi alat politik.

Namun, yang paling efektif dari Orde Baru bukan hanya pelarangan resmi, melainkan penciptaan rasa takut, persis yang kembali terjadi hari-hari ini. Kampus pun membubarkan nonton bersama dan diskusi film. Bahkan, media melakukan swasensor, memberi batas tak tertulis tentang apa yang boleh dan tidak boleh ditulis wartawannya.

Jika dahulu negara menggunakan pemberedelan langsung terhadap media seperti yang dialami majalah Tempo, Editor, atau Detik pada 1994, kini kontrol bekerja lebih cair dan lebih tersembunyi.

Hari ini, pola-pola teror terhadap kebebasan berekspresi itu tampak kembali hidup meski dalam bentuk berbeda.

Jika dahulu negara menggunakan pemberedelan langsung terhadap media seperti yang dialami majalah Tempo, Editor, atau Detik pada 1994, kini kontrol bekerja lebih cair dan lebih tersembunyi. Negara tidak selalu perlu melarang berita atau menyensor film secara resmi. Tekanan cukup

dilakukan melalui pengawasan aparat, ancaman hukum, kriminalisasi digital, atau tekanan ekonomi.

Di titik inilah represi bertemu dengan swasensor. Media arus utama hari ini berada dalam situasi ekonomi yang rapuh. Pendapatan iklan terus turun, sementara kepemilikan media semakin terkonsentrasi pada elite politik dan bisnis. Banyak perusahaan media hidup dalam ketergantungan terhadap iklan pemerintah, proyek korporasi, dan relasi kekuasaan.

Akibatnya, kritik menjadi mahal. Ketua Umum AJI Indonesia saat peringatan Hari Pers Sedunia pada 3 Mei lalu mer sepanjng tahun 2025 terjadi kekerasan pada jurnalis s baik kekerasan fisik maupun digital. Merujuk pada lapo Without Borders (RSF), peringkat kebebasan pers Indc 2026 turun ke posisi ke-129 dari 180 negara dengan ka dari peringkat ke-127 pada tahun 2025.

Iklan

Peringkat Indeks Kebebasan Pers 2025 versi Reporters Without Borders (RSF)

Menu

Cari



| | | | Teks | Baca Nanti | Bagikan |
|------------|-------------------|--|------|------------|---------|
| 1 | Swedia | | | | |
| 5 | Finlandia | | | | |
| 6 | Denmark | | | | |
| 7 | Irlandia | | | | |
| 8 | Portugal | | | | |
| 9 | Swiss | | | | |
| 10 | Ceko | | | | |
| 127 | Indonesia* | | | | |

Sumber: Reporters Without Borders (RSF); Diolah Litbang Kompas/TYR



Selain kekerasan fisik dan digital, muncul kembali praktik sensor dan swasensor (*self-censorship*) yang semakin menguat. Praktik yang dulu sering dilakukan di era Orde Baru. "Banyak jurnalis dan redaksi terpaksa melakukan swasensor dengan membatasi diri, menghindari isu-isu sensitif, atau mengubah substansi liputan karena mempertimbangkan tekanan politik, ancaman hukum, maupun kepentingan ekonomi," sebut Nani.

Sementara praktik sensor dilakukan pihak pemerintah maupun lembaga bisnis dengan menekan media agar melakukan penghapusan berita, mengubah judul ataupun isi berita, berita titipan, sampai ancaman penghentian iklan atau kerja sama.

Dalam situasi seperti itu, lahirlah ruang-ruang alternatif yang disebut banyak kalangan sebagai *homeless media* atau media tunawisma, yaitu media tanpa rumah besar korporasi. Mereka hadir dalam bentuk kanal media sosial, rumah produksi dokumenter independen, *podcast* investigatif, akun informasi publik, media komunitas, hingga kolektif jurnalisme warga yang tidak memiliki situs berita resmi seperti media konvensional.

Kasus pembubaran nonton bersama Pesta Babi tidak bisa dibaca hanya sebagai pelarangan film. Ia adalah bagian dari lanskap yang lebih besar, upaya mengendalikan ruang percakapan publik.

Ironisnya, ruang alternatif yang awalnya tumbuh sebagai koreksi terhadap media arus utama kini juga mulai dirangkul sekaligus diawasi negara.

Pada awal Mei 2026, Badan Komunikasi Pemerintah RI melalui Kepala

Bakom Muhammad Qodari menyatakan pemerintah menggandeng sejumlah *new media* atau *homeless media* sebagai mitra komunikasi publik untuk menyebarkan informasi program Presiden Prabowo Subianto.

Di permukaan, langkah itu tampak sebagai strategi komunikasi modern pemerintah untuk menjangkau publik digital. Namun, di baliknya, muncul pertanyaan yang lebih dalam: ketika negara mulai merangkul media-media alternatif sebagai mitra resmi komunikasi pemerintah, apakah ruang independen mereka masih benar-benar bebas?

Fenomena ini memperlihatkan pola baru pengendalian informasi di era digital. Jika Orde Baru mengontrol media melalui izin terbit dan sensor langsung, kini negara berusaha masuk ke semua jalur distribusi narasi, termasuk media sosial dan kanal-kanal independen yang sebelumnya berada di luar orbit kekuasaan.

Bentuk kontrolnya tidak selalu represif. Kadang justru melalui kooptasi.

Media alternatif yang kritis berpotensi diisolasi atau ditekan, sementara yang bersedia menjadi mitra komunikasi pemerintah memperoleh akses, legitimasi, dan peluang ekonomi. Dalam situasi industri media yang rapuh, mekanisme seperti ini efektif menciptakan kepatuhan tanpa perlu pemberedelan terbuka.

Iklan

Iklan

UMI (RAD)

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar pekan proyek masyarakat sipil bertajuk "Habis Jakarta, 14 Oktober 2019. Pada hari pertama digelar diskusi bertema "Penegakan I menghadirkan narasumber peneliti ICW Almas Sjafrina, Ketua Kode Inisiatif Veri Ju Fariz, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Gita Putri Damayana, K Muhammad Isnur, dan peneliti Indonesia Legal Roundtable Rizki Yudha (dari kiri k

II

Karena itu, kasus pembubaran nonton bersama *Pesta Bawi* tidak bisa dibaca hanya sebagai pelarangan film. Ia adalah bagian dari lanskap yang lebih besar, upaya mengendalikan ruang percakapan publik.

Membangun narasi tunggal

Negara tampaknya memahami bahwa publik kini tidak lagi sepenuhnya percaya pada media arus utama. Narasi kritis justru tumbuh melalui dokumenter independen, kanal Youtube, *podcast*, akun media sosial, dan forum-forum komunitas kecil. Maka, ruang-ruang itulah yang kini mulai diawasi, ditekan, atau dirangkul agar tetap berada dalam orbit narasi

resmi.

Kalau ruang-ruang alternatif ini juga dibungkam atau dijinakkan, masyarakat akan kehilangan tempat untuk mendengar perspektif di luar narasi resmi. Jadi, serangkaian pembubaran nonton bersama dan diskusi ini bukan cuma soal film. Ini soal siapa yang boleh bercerita tentang Indonesia. Dan di sinilah bahaya terbesar situasi hari ini.

Demokrasi Indonesia secara formal memang berbeda dengan Orde Baru. Tidak ada lagi Departemen Penerangan yang memberedel media secara terbuka. Namun, secara substantif, pola pengendalian informasi tetap berlangsung melalui kombinasi represi, kooptasi, dan ketergantungan ekonomi.

Media besar dijinakkan oleh pasar, oligarki kepemilikan, hingga mengendalikan ruang redaksi dengan menanam orang. Media alternatif ditekan melalui intimidasi atau dirangkul menjadi corong komunikasi pemerintah. Hasil akhirnya sama, publik kehilangan ruang untuk mengakses informasi yang kritis dan beragam.

Padahal, demokrasi membutuhkan kebisingan gagasan. Ia membutuhkan film dokumenter yang mengganggu kenyamanan, media yang berani mengkritik kekuasaan, dan ruang diskusi tempat warga dapat berpikir tanpa rasa takut.

Karena itu, pelarangan *Pesta Babi* sesungguhnya bukan hanya tentang satu film. Ia adalah alarm tentang menyempitnya ruang sipil di Indonesia.

Dan sejarah menunjukkan, ketika negara mulai takut pada film, media independen, dan percakapan publik yang liar, biasanya yang sedang mereka takutkan bukan ancaman keamanan, melainkan warga yang mulai melihat kenyataan dari sudut pandang yang berbeda.

Versi cetak/epaper artikel ini terbit di harian Kompas edisi **13 Mei 2026** di halaman **2** dengan judul **"Film "Pesta Babi" dan Bayang-bayang Represi"**.

[Baca Epaper Kompas](#)

pesta babi

demokrasi

pembubaran

masyarakat sipil

Papua

utama

Kerabat Kerja

Penulis: Ahmad Arif | **Editor:** Nasrullah Nara | **Penyelarasa Bahasa:** Amin Iskandar

Komentar Pembaca

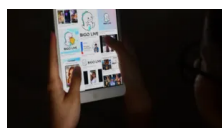
Belum Ada Komentar

Tulis Komentar

Komentar Anda..

Kirim

Artikel Terkait



Fenomena ” Homeless Media” di Dunia: Saat Media Tanpa Rumah, Demokrasi Kehilangan Penjaganya

19 Mei 2026



Pemerintah Monolog Menyumbat Dialog

15 Mei 2026



28 Tahun Reformasi, Ancaman Militerisme hingga Bayang-bayang Krisis

Ekonomi

9 jam lalu

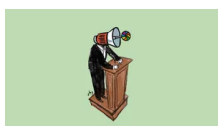


Yusril: Pemerintah

Tidak Pernah Melarang Nobar Film ” Pesta Babi”

14 Mei 2026

Iklan



” Reshuffle”, ”

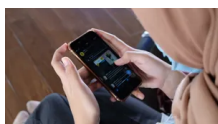
Homeless Media”, dan Komunikasi Elektoral Negara

18 Mei 2026



MBG dan Malunya Seorang Dosen

19 Mei 2026



Apakah ” Homeless Media” Mampu Menjaga Demokrasi?

MBG dan Malunya Seorang Dosen

19 Mei 2026 · 08:34 WIB

Prabowo Wajibkan Ekspor CPO lewat BUMN, Mau Dibawa ke Mana Industri Sawit Indonesia?

1 jam lalu

IHSG Melemah Setelah Pidato Prabowo, Investor Cermati Kebijakan Pemerintah

6 jam lalu

Dunia Ringkasan

3 jam lalu

Membaca Prabowonomics dengan Kaca Mata Sarbini

1 jam lalu

3 jam lalu

Lainnya Dalam Pendidikan & Kebudayaan



Aksi Guru Madrasah Swasta Tuntut Kebijakan Afirmasi

2 jam lalu



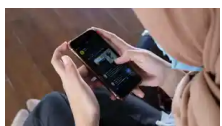
Merokok Membuka Jalan ke Penggunaan Narkoba

2 jam lalu



Mahasiswa Diajak Lestarkan Lingkungan le Media Sosial

3 jam lalu



Kompas Brief
Apakah "Homeless Media" Mampu Menjaga



Pelaporan Kekerasan di Kampus Meningkatkan, Butuh Keseriusan Pencegahan dan Penanganan

5 jam lalu



Belajar Berbagi, Sejahtera Bersama

6 jam lalu

Iklan

Terbaru

Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Dibahas dalam Revisi UU Polri

13 menit lalu

"Redaksi Yth": Hari Kebangkitan Nasional

18 menit lalu

XLSmart Fokus Konsolidasi Pasca Merger, Dividen Tahun Buku 2025 Absen

26 menit lalu

Sektor Migas Dikecualikan dari Badan Ekspor dan Aturan DHE

30 menit lalu

Akademisi Desak MK Tegaskan Yurisdiksi Peradilan Militer

40 menit lalu

Demokrasi?

3 jam lalu



20.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Tanazul

3 jam lalu



Kantor Redaksi

Menara Kompas
Lantai 5, Jalan
Palmerah Selatan
21, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta,
Indonesia, 10270.

Tlp. +6221 5347 710 +6221 5347 720
+6221 5347 730 +6221 530 2200

Kantor Iklan

Menara Kompas
Lantai 2, Jalan
Palmerah Selatan
21, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta,
Indonesia, 10270.

Produk Bisnis Tentang Lainnya

ePaper Advertorial Profil Bantuan
Perusahaan
Kompas.id Gerai Sejarah
Interaktif Event Organisasi
Kompas Klasika
Data Klasiloka
Kompaspedia Iklan

Layanan Pelanggan

Kompas Kring
 +6221 2567 6000
Whatsapp
 +62812 900 50 800
Email
 hotline@kompas.id

Ikuti Harian Kompas di

@hariankompas
 @hariankompas
 @hariankompas
 Harian Kompas

Tlp. +6221
8062
6699

© 2026 PT Kompas Media Nusantara · Organisasi · Tanya Jawab · Hubungi Kami ·
Sidik Gangguan · Pedoman Media Siber · Ketentuan dan Kebijakan Privasi ·
Karier · Iklan · Berlangganan ·